

rimah ta'zir, maka kita perlu mengetahui bagian-bagian hukuman ta'zir. Adapun hukuman atas jarimah-jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat, Hukuman ta'zir ini diancamkan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' karena perbuatan itu sendiri, dan mengerjakannya dipandang maksiat. Maksiyat-maksiyat tersebut dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Maksiyat yang dikenakan hukuman had, tetapi kadang-kadang ditambah dengan kafarat, seperti pembunuhan, pencurian, zina dan sebagainya.
- b. Maksiat yang dikenakan kafarat, tetapi tidak dikenakan hukuman had.
- c. Maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat dan sebagian besar maksiat dan yang tidak termasuk dalam bagian a dan b termasuk dalam bagian ini. Adapun maksiat yang termasuk dalam bagian ini antara lain makan beberapa makanan tertentu, mengkhianati janji, sumpah palsu, berjudi dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir yang terpenting, dan untuk masing-masing perbuatan tersebut ada nas-nasnya yang jelas (Hanafi 1967 :69).

2. Hukuman ta'zir mewujudkan kemaslakhatan umum, yaitu hukuman perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang kemudian dipandang sebagai perbuatan maksiat karena

segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at Islam melakukannya. Perbuatan haram adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam, Karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda (Sabiq 1986 : X : 11) .

Yang dimaksud dengan kata-kata " جريمة " adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakannya perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (Hanafi 1967 : 1).

Dengan demikian pengertian jarimah atau jinayah tersebut tidak berbeda dengan perbuatan pidana, maka dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian jarimah atau jinayah adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara' itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.

Berkaitan dengan unsur moril ini, ada kaidah yang mengatur tentang syarat seorang pelaku jarimah haruslah mukallaf (Audah 1963 : 123), yang berbunyi :

"Syara' tidak membebani kecuali pada orang yang mampu - memahami dalil ta'lif serta dapat menerima atas apa yang dibebankan kepadanya, agama juga tidak membebani seseorang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga seorang itu dapat mentaatinya".

Kaidah ini mengandung beberapa syarat agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu :

- 1). Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklifi, maksudnya ia harus mampu memahami nash syari'at yang menunjukkan hukum.

Berdasarkan syari'at ini maka anak kecil, orang gila, orang tidur tidak dapat dijatuhi hukuman, berdasarkan sabda Nabi SAW :

ان القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك
وعن النائم حتى يستيقظ (رواه البخاري)

Artinya :

"Terangkat pena itu dari tiga orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sembuh" (Bukhori - tth IV : 176).

- 2). Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi hukuman atasnya.

atau larangan tidak mungkin disuruh atau dilarang (Hanafi 1986 : 58).

Namun demikian, kaidah ini dibatasi dengan suatu kaidah lain yang berbunyi : Tidak dapat diterima dilingkungan Islam alasan tidak tahu hukum, berdasarkan firman Allah berbunyi :

لَا تُذَرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (الانعام : ١٩)

Artinya :

"Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu - dan kepada orang-orang yang sampai al-qur'an kepadanya (Al-qur'an 6 : 19) (Depag 1987 : 189).

Berkaitan dengan kaidah tersebut diatas maka sebagai mana telah penulis uraikan bahwa ketentuan Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia pada umumnya dan khususnya yang mengatur perbuatan mukallaf yang disimpulkan dari dalil-dalil syari'at. Dalil-dalil ini diambil dari sumber hukum Islam yang pada dasarnya ada tiga sumber pokok yaitu : Al-Qur'an , Assunnah , dan Ar-Ra'yu .

Berdasarkan ketiga sumber hukum Islam inilah maka - ketentuan tentang jarimah ta'zir, khususnya tentang sanksi hukuman jarimah penipuan diserahkan pada hasil ijtihad manusia berdasarkan adanya kemaslahatan ummat.

ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan tersebut (Hanafi 1967 : 259).

2. Hukuman jarimah penipuan.

Sanksi hukuman jarimah tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia / masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan waktu dan tempat (Ash-Shiddiqi 1937 : 37). Dengan suatu syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip umumnya. Karenanya ketentuan tentang jarimah ta'zir tidak diperlukan aturan tersendiri, melainkan cukup dinyatakan secara umum (Hanafi 1967 : 69). Demikian itu disyaratkan pula bahwa sanksi hukuman itu memiliki daya represif, preventif dan mendidik sesuai dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman.

Sanksi hukuman ta'zir merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada had dan tidak ada kafarat terhadap jarimah yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukumannya (Ash-Shiddiqi 1937 : 36). Dengan demikian sanksi hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hukum syara' yaitu, jarimah-jarimah hudud dan qishash (diyat). Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, Hakim diberi

